

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama didunia, bahkan pada zaman nabi pun prostitusi atau pelacuran sudah ada, tidak terkecuali di Indonesia. Fenomena prostitusi hingga kini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, baik upaya preventif maupun upaya represif untuk menanggulangi masalah prostitusi belum menampilkan hasil maksimal hingga kini. Belum adanya satu program terpadu dari pemerintah untuk mengatasi prostitusi menyebabkan fenomena wanita tuna susila terus tumbuh semakin meningkatnya jumlah wanita tuna susila dengan subur, yang dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah wanita tuna susila setiap tahunnya. Praktek prostitusi yang dilakukan secara terang-terangan hingga praktek prostitusi terselubung.

Wanita Tuna Susila (WTS) sudah lama ada di Indonesia, melihat sejarah munculnya, saat itu prostitusi muncul di seputar tahun 1820 yaitu ketika dibuat jalan Anyer Panarukan oleh Daendells, kemudian pada tahun 1825-1830, ketika dibuat jalan kereta api di tanah Jawa. Pada tahun 1840-an ketika stasiun kereta api dibuat, saat itu para pekerja pembuat jalan jarang sekali pulang ke rumah bertemu istrinya hingga inilah yang membuat kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi dengan baik dan mendorong prostitusi semakin merejalela. Peninggalan budaya ini bisa kita lihat saat ini yaitu kompleks

prostitusi pada umumnya berlokasi berdekatan dengan stasiun Kereta Api seperti di daerah Jakarta pada Stasiun Kereta Api Senen, Manggarai, Gambir, dan lain-lain.

Masalah yang ada dilingkungan sosial yang bersinggungan dengan norma-norma kehidupan. Salah satu permasalahan tersebut adalah WTS (Wanita Tuna Susila). salah satu masalah sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan moral. Fenomena yang terus berkembang ini dari masa ke masa, fenomena tersebut adalah pelacur/wanita panggilan dan lebih dikenal dengan sebutan PSK bisa diartikan sebagai salah tingkah, tidak susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma norma susila. Beberapa wanita tuna susila menikmati perannya sebagai wanita pekerja seks komersial. Wania tuna susila dianggap sebagai pekerjaan yang menjanjikan karena dengan menjadi wanita tuna susila, uang dapat dengan mudah diperoleh sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, namun di balik itu semua, wanita seks komersial mengalami konflik dalam dirinya.

Koentjoro (1996:50) mengemukakan bahwa Wanita Tuna Susila (WTS) selalu mengalami konflik dalam dirinya, baik konflik kepentingan antara membutuhkan uang dan perasaan dosa, atau juga karena adanya perasaan tidak aman akan statusnya sebagai pekerja seks komersial. Banyak resiko yang harus dihadapi juga dapat memicu munculnya konflik dalam diri wanita pekerja seks komersial. Resiko yang dihadapi wanita tuna susia berasal dari resiko fisik dan resiko seksual, maupun resiko sosial. Resiko fisik dan resiko seksual yang dihadapi wanita tuna susila (wts) antara lain berhubungan dengan resiko

penularan penyakit kelamin menular seksual dan kehamilan. Selain itu kekerasan juga bias terjadi dalam prostiusi. Kehidupan wanita tuna susila (wts) merupakan fenomena yang tidak dapat diterima sebagian kalangan masyarakat. Wanita tuna susila (wts) dipandang sebagai mahluk yang menyandang stereotip negative dan dianggap tidak pantas menjadi bagian dari masyarakat.

Di Kabupaten majalengka khususnya di kecamatan jatiwangi sendiri kegiatan prostitusi sama halnya dengan prostitusi dikota lain. Ilegal namun sangat menjamur dapat dengan mudah ditemukan dan dijumpai seperti cendawan dimusim hujan. Baik secara terang-terangan atau pun berkedok tempat usaha seperti tempat karaoke, tempat pijat dll. Biasanya seorang perempuan wanita tuna susila (wts) tidak mau menjelaskan secara terang-terangan bahwa dirinya adalah seorang wanita tuna susila (wts) namun untuk menutupinya dengan bekerja disuatu tempat. Karena masyarakat majalengka masih menjunjung nila-nilai dan norma sosial yang berlaku.

Di Kabupaten Majalengka wanita tuna susila (wts) ini di atur dalam peraturan daerah Kabupaten Majalengka nomor 14 tahun 2007 tentang pelarangan prostitusi di Kabupaten Majalengka. dalam penertibatan atau penegakan peraturan daerah tersebut Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial sangat berperan aktif, namun dalam penertiban dan pembinaanaa pekerja seks komersial terhadap masalah yang timbul yaitu para wanita tuna susila (wts) masih membuka prakteknya hal ini dikarenakan dalam kebijakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas sosial belum optimalnya

koordinasi yang dilakukan untuk menertibkan para pekerja seks komersial ini hanya dilakukan 2 kali dalam satu bulan.

Penyebab atau alasan para wanita tuna susila (wts) melakukan atau menyenangi pekerjaan yang dia jalankan ini adalah pertama karena kebutuhan biologi yang ketagihan, kedua faktor ekonomi melainkan hanya mencari kepuasan bagi dirinya hanya untuk mendapatkan barang atau gaya hidup yang dia inginkan. Poin ketiga karena ia tidak bias mengendalikan nafsu dan juga karena pondasi keimanannya rendah. keberadaan wanita tuna susila (wts) merupakan fenomena yang tidak asing lagi dalam kehidupan masyarakat kecamatan jatiwangi akan tetapi keberadaan wanita tuna susila (wts) tersebut ternyata masih menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Jatiwangi. Perubahan masyarakat dari agraris menuju masyarakat industri dapat mengakibatkan perubahan, baik pola dari hidup, nilai-nilai, norma social bahkan juga pada struktur masyarakat. Dengan perubahan-perubahan sosial yang terjadi di Kecamatan Jatiwangi menyebabkan banyaknya masalah sosial yang timbul di kehidupan masyarakat Kecamatan Jatiwangi. masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada.

Berdasarkan masalah diatas, sudah menjadi tugas Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Majalengka untuk membina. Agar dapat mengatasi masalah yang terjadi. Maka dari itu penulis berkeinginan untuk mempelajari lebih mendalam dengan mengadakan penelitian dan mengambil judul **“KOORDINASI DALAM PEMBINAAN PENYAKIT**

MASYARAKAT DI KABUPATEN MAJALENGKA (Studi Kasus Wanita Tuna Susila di Kecamatan Jatiwangi)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Koordinasi Dalam Pembinaan Penyakit Masyarakat Dikabupaten Majalengka (Studi Kasus WTS di Kecamatan Jatiwangi) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat koordinai dalam pembinaan penyakit masyarakat di Kabupaten Majalengka?
3. Upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembinaan penyakit masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui Koordinasi Dalam Pembinaan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Majalengka
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Koordinasi Dalam Pembinaa Penyakit Masyarakat di Kabupaten Majalengka.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembinaan penyakit masyarkat di Kabupaten Majalengka.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini secara garis besar diharapkan mempunyai dua kegunaan utama yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Negara, khususnya kajian Koordinasi dalam pembinaan penyakit masyarakat di Kabupaten Majalengka.
- b. Dapat memperkaya literatur atau kepustakaan dalam bidang Administrasi Negara terutama dalam kajian Koordinasi dalam pembinaan penyakit masyarakat di Kabupaten Majalengka

2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan penelitian diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang bermanfaat terutama bagi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-pp) di Kabupaten Majalengka.
- b. Bagi penulis, dapat memberikan kesempatan pada penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan teori yang dipelajari selama ini, serta dapat menambah wawasan dan informasi tentang hal yang akan diteliti dan dapat mengembangkan kemampuan berfikir penulis dalam karya ilmiah ini.

1.6 Kerangka Pemikiran

Sebagaimana diketahui bahwa untuk mencapai tujuan yang melibatkan beberapa organisasi atau instansi diperlukan adanya koordinasi agar dalam pelaksanaan kegiatan tidak terjadi kesimpangsiuran. Dengan adanya

koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan diharapkan sasaran tercapai dengan terarah dan terpadu. Untuk membahas lebih lanjut tentang pelaksanaan koordinasi Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan penyakit masyarakat atau Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka, sebagai kerangka pemikiran penulis berpedoman pada pendapat tentang pengertian koordinasi.

Koordinasi adalah proses penyatu-paduan sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit terpisah (bagian atau bidang fungsional) dari sesuatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut Stoner (1988:12).

Menurut G.R. Terry (2008: 88) Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Pentingnya koordinasi dikemukakan oleh Soewarno Handyaningrat (2001:71) yang mengatakan bahwa koordinasi dimaksud sebagai usaha dalam dari satuan-satuan kerja (unit) organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna untuk mencapai tujuan.

Menurut Dann Sugandha, (1988:13) Koordinasi adalah penyatupaduan gerak dari seluruh potensi dan unit-unit organisasi atau organisasi-organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar-benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efisien.

Menurut Dann Sugandha yang terkandung dalam unsur-unsur usaha koordinasi antara lain adalah:

a. Ciri-ciri koordinasi

Soewarno Handayani (2002:58) menyatakan bahwa ciri-ciri koordinasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tanggung jawab dari pada koordinasi adalah terletak pada pimpinan.
2. Adanya proses
3. Pengaturan secara terarut dari usaha kelompok
4. Konsep kesatuan tindakan
5. Tujuan koordinasi adalah tujuan-tujuan bersama.

b. Macam-macam koordinasi

Malayu Hasibuan (2003: 128-129) mengatakan bahwa koordinasi dapat dibedakan atas koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal.

1. Koordinasi Vertikal

Yaitu suatu tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya, tepatnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung.

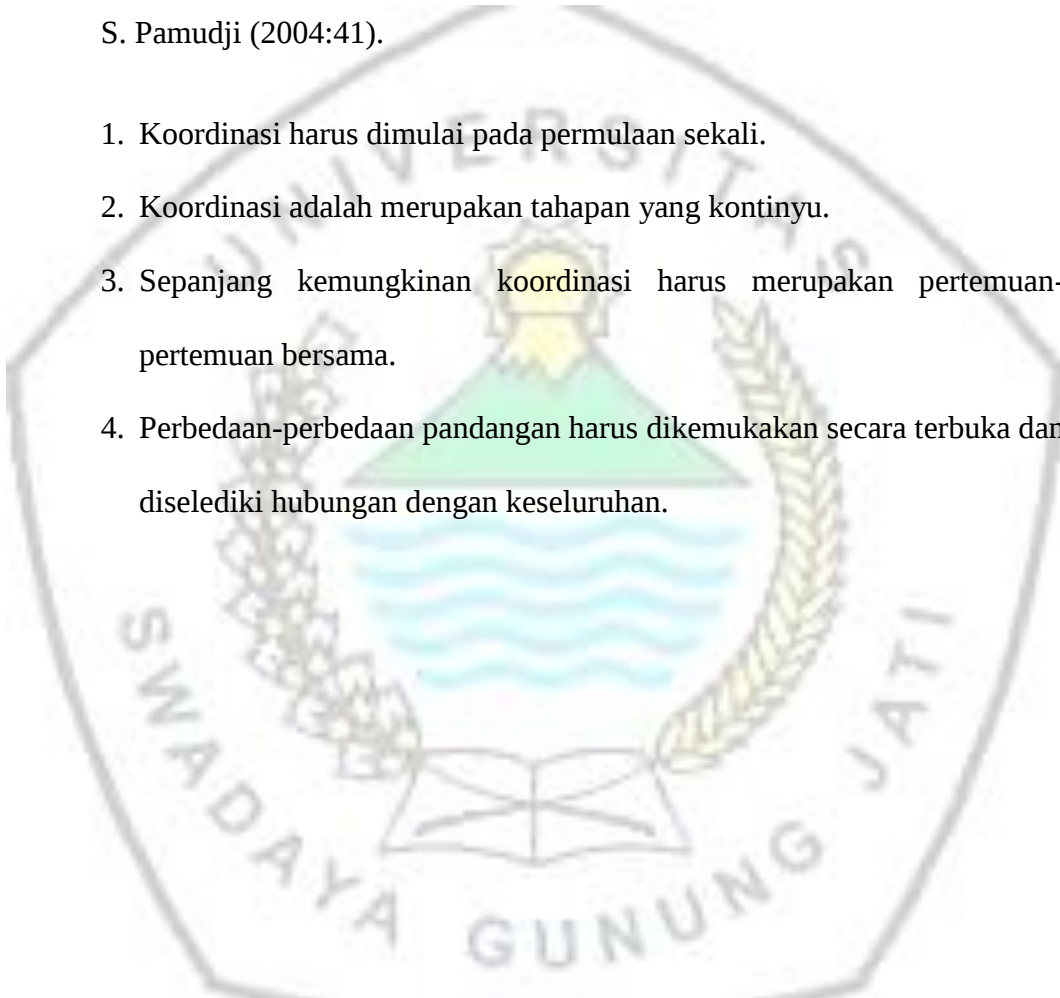
2. Koordinasi Horizontal

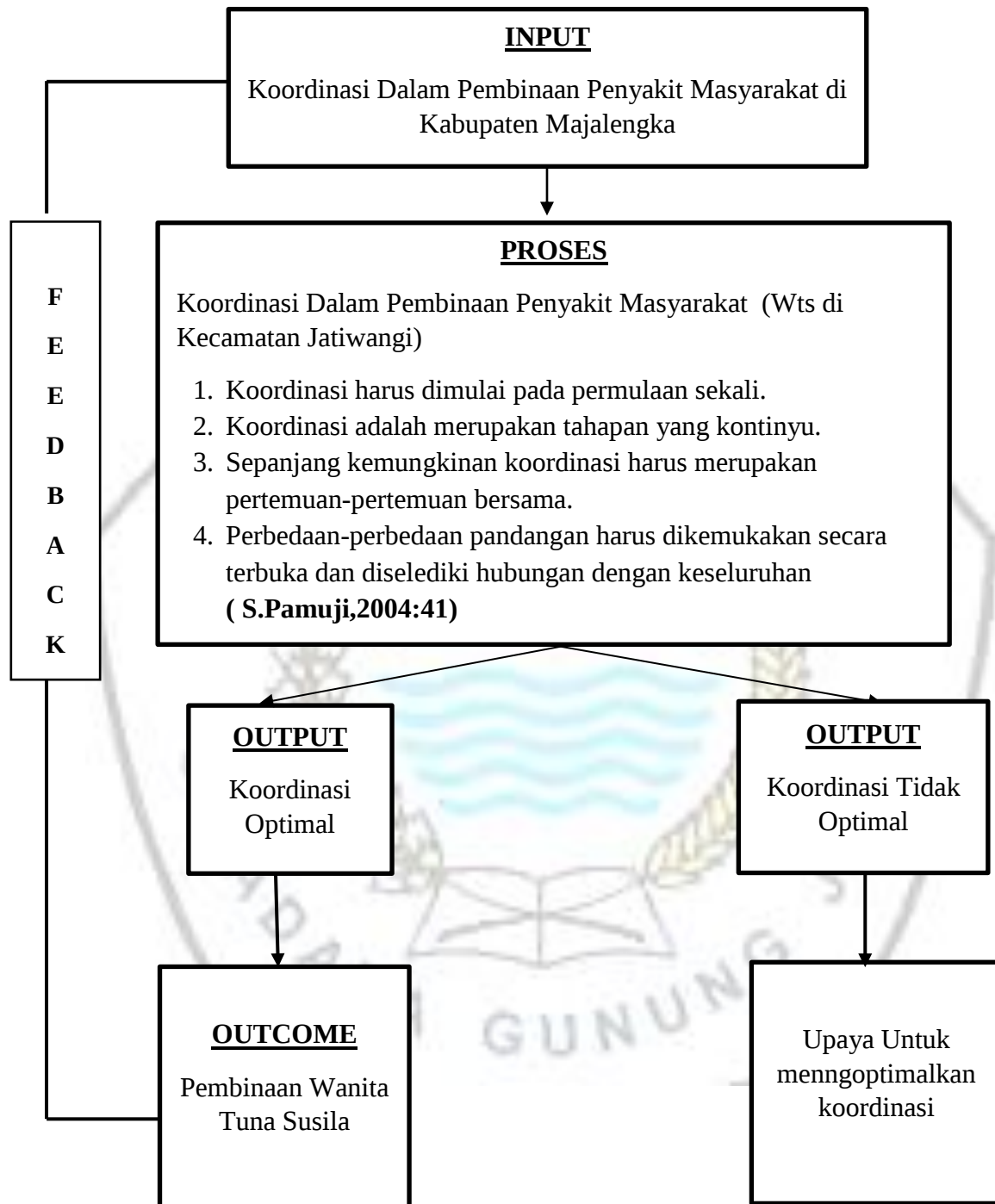
Adalah suatu tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dijalankan terhadap kegiatan-kegiatan dalam level organisasi yang tersingkat.

c. Prinsip-prinsip Koordinasi

Adapun prinsip-prinsip koordinasi tersebut sebagaimana dikemukakan oleh S. Pamudji (2004:41).

1. Koordinasi harus dimulai pada permulaan sekali.
2. Koordinasi adalah merupakan tahapan yang kontinyu.
3. Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuan-pertemuan bersama.
4. Perbedaan-perbedaan pandangan harus dikemukakan secara terbuka dan diselediki hubungan dengan keseluruhan.





GAMBAR 1.1
KERANGKA PEMIKIRAN

1.7 Definisi dan Operasional Konsep Penelitian

1.7.1 Definisi Konsep Penelitian

Untuk memudahkan dalam pembahasannya, penulis akan mengemukakan sebagai berikut;

1. Koordinasi adalah proses penyepakatan bersama yang mengikat berbagai kegiatan dan unsur yang berbeda-beda demikian rupa, sehingga disisi yang satu kegiatan atau unsur tersebut terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain keberhasilan kegiatan yang satu tidak merusak keberhasilan kegiatan lainnya.
2. Pinsip-prinsip koordinasi tersebut sebagaimana dikemukakan oleh S. Pamudi (2004:41) Koordinasi harus dimulai pada permulaan sekali.
 - 1) Koordinasi adalah merupakan tahapan yang kontinyu
 - 2) Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuan-pertemuan bersama
 - 3) Perbedaan-perbedaan pandangan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki hubungannya dengan keseluruhannya.
3. Pembinaan merupakan totalitas kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing, supaya dapat mencapai prestasi kerja yang efektif dan efisien. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik.

“Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya”. (Musaneff,1991:11).

a) Fungsi Pembinaan

Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku, fungsi pembinaan diarahkan untuk :

1. Memupuk kesetiaan dan ketaatan.
 2. Meningkatkan adanya rasa pengabdian rasa tanggung jawab, kesungguhan dan kegairahan bekerja dalam melaksanakan tugasnya.
 3. Meningkatkan gairah dan produktivitas kerja secara optimal.
 4. Mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa.
 5. Memperbesar kemampuan dan kehidupan pegawai melalui proses pendidikan dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi (wadah yang ditentukan).
4. Secara *etimologi* kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu “prostituere” artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata

‘prostitute’ merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal.

Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK).

5. Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli:

Koentjoro: “yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan.”

Sarjana P.J de Bruine van Amstel: “prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran.”

Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:

- a) Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa

kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.

- b) Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsunafsu seks dengan imbalan pembayaran.
- c) Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

1.7.2 Operasionalisasi Konsep Penelitian

Operasionalisasi konsep penelitian dilakukan dengan cara menjabarkan konsep variable penelitian kedalam beberapa dimensi yang sesuai dengan teori yang digunakan tersebut kemudian dijabarkan menjadi indikator-indikator.

Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka aspek kajian penelitian yaitu: (Koordinasi) dioperasionalisasikan atau dijabarkan kedalam dimensi dan parameter data dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Operasionalisasi Penelitian

Aspek Kajian	Dimensi	Parameter
Koordinasi (S.Pamudji 2004:41)	Koordinasi harus dimulai pada permulaan sekali	1. Koordinasi sejak perencanaan 2. Komitmen pihak-pihak yang
	Koordinasi adalah merupakan tahapan yang kontinyu	1. Rapat koordinasi mutlak 2. Koordinasi sesuai dengan pedoman pelaksanaan
	Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuan-pertemuan bersama	1. Mengadakan rapat koordinasi dengan melibatkan pihak terkait 2. Rapat koordinasi dihadiri pihak-pihak terkait
	Perbedaan-perbedaan pandangan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki hubungannya dengan keseluruhannya.	1. Menerima perbedaan pendapat 2. Menerima masukan dari berbagai pihak

8. Metode Penelitian

1.8.1 Metode Penelitian yang digunakan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana dalam penyajian data penulis menggunakan pemaparan dan juga gambaran-gambaran karena penulis hanya ingin menggambarkan situasi atau peristiwa dan memanfaatkan teknik, wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah metode naturalistik. Metode naturalistik adalah penelitian yang dilakukan pada latar alamiah yaitu pada situasi sosial yang sedang berlangsung. Pendekatan yang digunakan dalam metode naturalistik adalah pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan fenomena yang sedang diteliti kemudian menganalisisnya secara mendalam.

Menurut (Sugiyono, 2013:9) dijelaskan penelitian kualitatif adalah: “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”

1.8.2 Informan dan Teknik Pemilihan Informan

Teknik pemilihan informan yang digunakan oleh penulis adalah teknik purposive sampling. Dalam teknik ini peneliti memilih dan menetapkan beberapa informan yang dinilai berkompeten yaitu yang memahami benar-benar masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono (2013:218) dijelaskan bahwa purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi, keterangan atau data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tergantung pada kebutuhan dan kedalaman penelitian. Untuk penelitian kualitatif pada dasarnya terdapat dua macam informan, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci adalah orang-orang yang banyak mengetahui masalah yang diteliti. Sedangkan informan pendukung adalah orang-orang yang berada diluar informan kunci yang memberikan informasi pelengkap atau tambahan yang diperlukan dalam penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, data apa yang digunakan. Jenis data merupakan darimana data diperoleh apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari data tidak langsung (data sekunder). Metode

pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan datanya yang digunakan adalah:

1. Studi Kepustakaan atau Literatur

Penulis melakukan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yaitu buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, internet, dan sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Studi Lapangan, terdiri dari :

- a. Observasi

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti, dengan cara mengadakan penelitian langsung pada obyek yang diteliti.

- b. Wawancara atau interview

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan para informan. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara terpimpin/terstruktur yang dilakukan secara mendalam (depth interview). Kedalaman wawancara ini sangat penting dalam penelitian kualitatif karena akan diperoleh data atau informasi yang

benar-benar lengkap, sehingga peneliti melakukan analisis dengan tajam dan mendalam.

c. Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal berupa foto atau gambar, video, rekaman suara, atau catatan lain yang berguna untuk melengkapi data kaitannya dengan koordinasi dalam pembinaan penyakit masyarakat di Kabupaten Majalengka

1.8.4 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif sama maknanya dengan uji validasi dan uji rehabilitas dalam penelitian kuantitatif. Instrumen penelitian atau pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bukan angket seperti pada penelitian kuantitatif melainkan peneliti itu sendiri dibantu oleh instrumen lain seperti buku, catatan lapangan, kamera, alat perekam dan lain-lain.

Teknik pengujian keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2011:330) teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Melalui teknik pengujian keabsahan data, penulis menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan berbagai data yang diperoleh dengan cara

check, re-check, dan cross check terhadap data itu. Triangulasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perpektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Penelitian kualitatif, suatu data dikatakan absah/akurat jika memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Ada kesamaan data dari hasil wawancara dengan informan. Data dinyatakan akurat jika untuk pertanyaan yang sama diperoleh data atau jawaban yang sama dari informan. Jika jawaban dari para informan berbeda, maka data itu belum akurat. Peneliti harus melakukan tringulasi lagi dengan cara *check, re-check, cross check* sampai diperoleh data atau informasi yang sama.
- b) Ada kesamaan data antara hasil wawancara dengan hasil pengamatan. Jika data dari hasil wawancara dengan hasil pengamatan itu tidak sama, maka data itu tidak absah atau akurat. Peneliti harus melakukan

tringulasi lagi dengan cara *check*, *re-check* dan *cross check* sampai diperoleh data atau informasi yang sama

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam kualitatif dilakukan dengan cara menganalisis secara mendalam data deskriptif yang diperoleh dari data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Milles and Huberman dalam Sugiyono (2013:246) mengemukakan bahwa: “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.

Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Analisis deskriptif dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Yaitu data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan, dirinci secara sistematis, kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus dan masalah penelitian. Dengan kata lain, reduksi data adalah memilih dan memilah data yang telah diperoleh. Data yang telah direduksi diharapkan memberikan gambaran yang lebih tajam, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Yaitu menyajikan data dalam bentuk uraian, gambar, tabel, dan sebagainya. Dalam display data ini hanya data yang relevan dengan fokus dan masalah penelitian yang disajikan.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Verifikasi)

Yaitu peneliti berusaha memperoleh makna dari berbagai data dikumpulkan kemudian dibuat pola, model, tema, hubungan dan persamaan terhadap hal-hal yang sering muncul.

4. Penarikan Kesimpulan

Yaitu menyimpulkan secara logis berdasarkan reduksi dan display data serta verifikasi di atas.

9. Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.9.1 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Dinas sosial dan Satuan polisi Pamong Praja (SATPOL-PP). Adapun alasannya penulis melakukan penelitian di Dinas Sosial dan Kantor satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP):

1. Ingin mengetahui tentang proses koordinasi dalam pembinaan penyakit masyarakat yang dilakukan Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong praja (SATPOL-PP) di Majalengka;
2. Data yang dibutuhkan dalam penelitian mudah diperoleh.
3. Letak lokasi yang sangat strategis dan sangat terjangkau oleh penulis dalam proses penyusunan proposal penelitian skripsi.

1.9.2 Jadwal Penelitian

Penelitian dilakukan selama 7 bulan tehitung mulai bulan Maret sampai dengan bulan September, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :



Tabel 1.2
Jadwal Penelitian

[illegible]

